



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta, Telepon (021) 3440783,  
Faksimile 3440783, Email ekpkd.otda@kemendagri.go.id

**NOTA DINAS**

Kepada : Kepala Pusat Penerangan  
Dari : Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah  
Tembusan : Plt. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah  
Tanggal : 1 Februari 2021  
Nomor : 065/ 85/ Ekp . DUKTEK  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Surat Penyampaian Data Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia Tahun 2018

Menindaklanjuti surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Bukti Permohonan Infomasi Nomor 20210003246 tanggal 27 Januari 2021 perihal Permintaan Data Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia tahun 2018 s/d 2020 untuk keperluan informasi skor LPPD, bersama ini kami Lampirkan data hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia Tahun 2018.


Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa untuk hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) daerah provinsi dan kabupaten/ kota seluruh Indonesia Tahun 2019 belum dapat kami sampaikan karena masih dalam proses penilaian atau evaluasi. Sementara, Hasil EPPD provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia tahun 2020 akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.

Direktur Evaluasi Kinerja dan  
Peningkatan Kapasitas Daerah

Drs. Akbar Ali, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750402.199311.1.001

## LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Diterima tgl : 27-1-2021
No. Surat : 20210003246	No. Agenda : 24
Tgl Surat : 27 Januari 2021	Sifat : <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia
	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera
Perihal : Permintaan Informasi Skor LPPD seluruh Kab/Kota di Indonesia thn 2018-2020	
Disampaikan Kepada Yth. : <input type="checkbox"/> Dir. Penataan Daerah, Otsus & DPOD <input type="checkbox"/> Dir. Fasilitasi KDH, DPRD dan HAL <input type="checkbox"/> Dir. Fasilitasi Kelembagaan & Kepegawaian Perangkat Daerah <input type="checkbox"/> Dir. Produk Hukum Daerah <input type="checkbox"/> Kepala Sub. Dit. Wilayah I <input type="checkbox"/> Kepala Sub. Dit. Wilayah II <input type="checkbox"/> Kepala Sub. Dit. Wilayah III <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Sub. Dit. Kapasda <input type="checkbox"/> Kepala Sub. Dit. Dukungan Teknis <input type="checkbox"/> Pejabat Pembuat Komitmen <input type="checkbox"/> Kepala Subbag Tata Usaha <input type="checkbox"/> BPP Dit EKPDK	Disposisi : <input type="checkbox"/> Mohon Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan <input type="checkbox"/> Koordinasi/Konfirmasikan <input type="checkbox"/> Wakili/Dampingi <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan (Laporan) <input type="checkbox"/> Koreksi/Sempurnakan <input type="checkbox"/> Monitor & Cari Masukan <input type="checkbox"/> Jadwalkan <input type="checkbox"/> File/Simpan .....
Catatan : <i>Jaka 2017. Syahri</i>	
Jakarta, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah  Dr. Akbar Ali, M.Si	



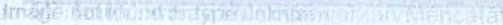
Catatan KTU :



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat  
Email: [pid@kemendagri.go.id](mailto:pid@kemendagri.go.id)  
Telp. (021) 394 3222

## BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20210003248

Nama Pemohon : Riska Amalia Sari  
Alamat : Pilangsari RT 05 RW 01, Potomayan, Nogosari, Boyolali  
Telepon : 083865827822  
Email : [riskaamalia7105@gmail.com](mailto:riskaamalia7105@gmail.com)  
Informasi Dimohon : Skor EPPD kabupaten/kota tahun 2018-2020  
Provinsi Tujuan : DKI Jakarta  
Kab/Kota Tujuan : Kota Administrasi Jakarta Pusat  
OPD Tujuan : Ditjen Otonomi Daerah  
Kandungan Informasi :   
Tujuan Penggunaan :   
Cara Memperoleh Informasi :   
Image data (format orylinankelengkapan) (Hard Copy / Soft Copy)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Ditjen Otonomi Daerah

Riska Amalia Sari

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maka:

- Bukti Permohonan ini merupakan hak pemohon yang dapat diakses secara publik. (Pasal 24 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat memperoleh informasi yang dimohonkan secara langsung atau melalui media elektronik. (Pasal 22 Ayat 1)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah dari permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. (Pasal 22 Ayat 1)
- Informasi Publik yang dapat diakses secara langsung atau melalui media elektronik. (Pasal 22 Ayat 1)
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. (Pasal 4 Ayat 1)

Indonesian Ministry of the Interior (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) and the National Information and Documentation Management Agency (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 118 - 8840 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL  
TAHUN 2017**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional pada tahun 2017.
- KEDUA : Peringkat dan status kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota secara nasional;
  2. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional;
  3. peringkat dan status kinerja sangat tinggi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan atribut bintang;
  4. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan metode pemetaan regional wilayah barat, tengah, timur dan penyelenggaraan otonomi khusus.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 terdiri atas:
- a. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan 33 (tiga puluh tiga) daerah provinsi secara nasional;
  - b. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) daerah kabupaten secara nasional; dan
  - c. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan 93 (sembilan puluh tiga) daerah kota secara nasional.
- KEEMPAT : Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2, terdiri atas:
- a. peringkat dan status kinerja 3 (tiga) besar penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang berprestasi paling tinggi secara nasional;
  - b. peringkat dan status kinerja 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional; dan
  - c. peringkat dan status kinerja 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan daerah kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional.

- KELIMA : Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT diusulkan untuk dipertimbangkan sebagai penerima penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha dan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
- KEENAM : Peringkat dan status kinerja sangat tinggi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan atribut bintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, angka 3 terdiri atas:
- a. 7 (tujuh) pemerintahan daerah provinsi yang berprestasi sangat tinggi secara nasional;
  - b. 107 (seratus tujuh) pemerintahan daerah kabupaten yang berprestasi sangat tinggi secara nasional; dan
  - c. 50 (lima puluh) pemerintahan daerah kota yang berprestasi sangat tinggi secara nasional.
- KETUJUH : Peringkat dan status kinerja sangat tinggi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan atribut bintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dikelompokkan kedalam lima kategori tingkat pencapaian kinerja dan diberikan atribut Bintang, mulai dari bintang Satu (\*) sampai dengan Bintang Lima (\*\*\*\*\*), guna menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dan kualitas capaian kinerja antar pemerintah daerah saat ini dalam kelompok sangat tinggi dan target peningkatan kinerja maksimal yang akan dicapai diwaktu yang akan datang.
- KEDELAPAN : Berdasarkan pengelompokan kedalam lima kategori tingkat pencapaian kinerja dan diberikan atribut Bintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, pemberian atribut bintang terhadap peringkat kinerja pemerintah daerah yang berprestasi sangat tinggi, ditentukan dengan metode/ cara sebagai berikut:
- a. penetapan atribut bintang untuk prestasi kinerja sangat tinggi terhadap provinsi dilakukan dengan menetapkan batas atas skor kinerja tertinggi 3,5000 untuk bintang (\*\*\*\*\*) dan 3,0000 untuk batas bawah bintang (\*), dan menetapkan 0,1250 sebagai interval pembagi dalam menentukan tingkatan pemberian atribut bintang.
  - b. penetapan atribut bintang untuk prestasi kinerja sangat tinggi terhadap kabupaten dan kota dilakukan dengan menetapkan batas atas skor kinerja tertinggi 3,7500 untuk batas atas bintang (\*\*\*\*\*) dan 3,0000 untuk batas bawah bintang (\*) dan menetapkan 0,1875 sebagai interval pembagi dalam menentukan tingkatan pemberian atribut bintang.
- KESEMBILAN : Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan metode pemetaan regional wilayah barat, tengah, timur dan penyelenggaraan otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 terdiri atas:
- a. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dengan metode pemetaan regional wilayah, 18 (delapan belas) provinsi wilayah barat, 11 (sebelas) provinsi wilayah tengah, 4 (empat) provinsi wilayah timur dan 2 (dua) provinsi otonomi khusus;

- b. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dengan metode pemetaan regional wilayah, 225 (dua ratus dua puluh lima) kabupaten wilayah barat, 118 (seratus delapan belas) kabupaten wilayah tengah, 53 (lima puluh tiga) kabupaten wilayah timur dan 38 (tiga puluh delapan) kabupaten di wilayah otonomi khusus; dan
- c. peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota dengan metode pemetaan regional wilayah, 66 (enam puluh enam) daerah kota wilayah barat, 21 (dua puluh satu) kota wilayah tengah, 6 (enam) kota wilayah timur dan 2 (dua) kota di wilayah otonomi khusus.

KESEPULUH : Bagi Daerah yang masuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional pada tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mendapat pengurangan skor, dikarenakan:

- a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahnya ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi per tanggal 1 April 2017 baik yang sudah maupun belum mendapat putusan pengadilan tetap (*inkracht*);
- b. tidak mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. tidak patuh terhadap kebijakan Pemerintah; dan
- d. melakukan pelanggaran hukum pidana/perdata.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 118 – 8840 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
SECARA NASIONAL TAHUN 2017

A. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
33 (TIGA PULUH TIGA) DAERAH PROVINSI SECARA NASIONAL.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	PROVINSI JAWA TIMUR	1	3,3021	ST
2	PROVINSI JAWA BARAT	2	3,2842	ST
3	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3	3,2048	ST
4	PROVINSI DKI JAKARTA	4	3,1712	ST
5	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	5	3,1593	ST
6	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	6	3,1020	ST
7	PROVINSI JAWA TENGAH	7	3,0981	ST
8	PROVINSI SULAWESI SELATAN	8	2,9926	T
9	PROVINSI DI YOGYAKARTA	9	2,9903	T
10	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	10	2,9362	T
11	PROVINSI BALI	11	2,9258	T
12	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	12	2,9135	T
13	PROVINSI SUMATERA SELATAN	13	2,8760	T
14	PROVINSI SULAWESI UTARA	14	2,8599	T
15	PROVINSI SUMATERA BARAT	15	2,8511	T
16	PROVINSI BANTEN	16	2,8319	T
17	PROVINSI BENGKULU	17	2,8216	T
18	PROVINSI SULAWESI BARAT	18	2,8172	T
19	PROVINSI RIAU	19	2,8123	T
20	PROVINSI SUMATERA UTARA	20	2,7835	T
21	PROVINSI GORONTALO	21	2,7765	T
22	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	22	2,7753	T
23	PROVINSI LAMPUNG	23	2,7575	T
24	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	24	2,7153	T
25	PROVINSI SULAWESI TENGAH	25	2,6809	T
26	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	26	2,6660	T
27	PROVINSI MALUKU	27	2,6345	T
28	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	28	2,5615	T
29	PROVINSI MALUKU UTARA	29	2,4120	T
30	PROVINSI PAPUA	30	2,3331	T
31	PROVINSI PAPUA BARAT	31	2,3329	T
32	PROVINSI ACEH	32	1,8006	S
33	PROVINSI JAMBI	33	1,7026	S

B. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 396 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM) DAERAH KABUPATEN SECARA NASIONAL.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KABUPATEN SIDOARJO	1	3,4108	ST
2	KABUPATEN PASURUAN	2	3,3978	ST
3	KABUPATEN KARANGANYAR	3	3,3886	ST
4	KABUPATEN BANYUWANGI	4	3,3873	ST
5	KABUPATEN KUNINGAN	5	3,3807	ST
6	KABUPATEN BONE	6	3,3445	ST
7	KABUPATEN BINTAN	7	3,3338	ST
8	KABUPATEN BULUKUMBA	8	3,3291	ST
9	KABUPATEN GIANJAR	9	3,3212	ST
10	KABUPATEN POHUWATO	10	3,3175	ST
11	KABUPATEN PATI	11	3,3144	ST
12	KABUPATEN GRESIK	12	3,3121	ST
13	KABUPATEN KARIMUN	13	3,2974	ST
14	KABUPATEN SRAGEN	14	3,2967	ST
15	KABUPATEN GORONTALO	15	3,2784	ST
16	KABUPATEN GARUT	16	3,2750	ST
17	KABUPATEN BANTUL	17	3,2641	ST
18	KABUPATEN SUKABUMI	18	3,2634	ST
19	KABUPATEN LAMONGAN	19	3,2631	ST
20	KABUPATEN BADUNG	20	3,2534	ST
21	KABUPATEN GOWA	21	3,2412	ST
22	KABUPATEN SEMARANG	22	3,2338	ST
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	23	3,2332	ST
24	KABUPATEN MADIUN	24	3,2240	ST
25	KABUPATEN PROBOLINGGO	25	3,2230	ST
26	KABUPATEN KLUNGKUNG	26	3,2143	ST
27	KABUPATEN BARRU	27	3,2113	ST
28	KABUPATEN PURWAKARTA	28	3,2097	ST
29	KABUPATEN SINJAI	29	3,2070	ST
30	KABUPATEN KEDIRI	30	3,2027	ST
31	KABUPATEN DEMAK	31	3,1989	ST
32	KABUPATEN SUMBAWA	32	3,1974	ST
33	KABUPATEN KUDUS	33	3,1959	ST
34	KABUPATEN KULON PROGO	34	3,1926	ST
35	KABUPATEN MAGETAN	35	3,1908	ST
36	KABUPATEN SLEMAN	36	3,1863	ST
37	KABUPATEN DHARMASRAYA	37	3,1856	ST
38	KABUPATEN PINRANG	38	3,1852	ST
39	KABUPATEN PACITAN	39	3,1840	ST
40	KABUPATEN PONOROGO	40	3,1672	ST
41	KABUPATEN INDRAMAYU	41	3,1636	ST
42	KABUPATEN KARAWANG	42	3,1596	ST
43	KABUPATEN TUBAN	43	3,1559	ST
44	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	44	3,1544	ST
45	KABUPATEN MAJALENGKA	45	3,1537	ST
46	KABUPATEN SIAK	46	3,1481	ST
47	KABUPATEN BOYOLALI	47	3,1428	ST
48	KABUPATEN SUMENEP	48	3,1416	ST

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
49	KABUPATEN LOMBOK BARAT	49	3,1345	ST
50	KABUPATEN SUKOHARJO	50	3,1332	ST
51	KABUPATEN PEKALONGAN	51	3,1311	ST
52	KABUPATEN SUMEDANG	52	3,1292	ST
53	KABUPATEN SOPPENG	53	3,1264	ST
54	KABUPATEN BOJONEGORO	54	3,1241	ST
55	KABUPATEN BLITAR	55	3,1238	ST
56	KABUPATEN NGANJUK	56	3,1215	ST
57	KABUPATEN BANYUMAS	57	3,1193	ST
58	KABUPATEN BOGOR	58	3,1174	ST
59	KABUPATEN JEMBRANA	59	3,1147	ST
60	KABUPATEN BANGKA	60	3,1147	ST
61	KABUPATEN MAGELANG	61	3,1128	ST
62	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	62	3,1095	ST
63	KABUPATEN GROBOGAN	63	3,1075	ST
64	KABUPATEN NGAWI	64	3,1011	ST
65	KABUPATEN TRENGGALEK	65	3,0997	ST
66	KABUPATEN PURWOREJO	66	3,0972	ST
67	KABUPATEN SERANG	67	3,0948	ST
68	KABUPATEN BANGKA TENGAH	68	3,0939	ST
69	KABUPATEN KENDAL	69	3,0932	ST
70	KABUPATEN WONOSOBO	70	3,0905	ST
71	KABUPATEN TANA TORAJA	71	3,0830	ST
72	KABUPATEN PASAMAN	72	3,0822	ST
73	KABUPATEN BLORA	73	3,0821	ST
74	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	74	3,0820	ST
75	KABUPATEN BULELENG	75	3,0808	ST
76	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	76	3,0758	ST
77	KABUPATEN LUMAJANG	77	3,0749	ST
78	KABUPATEN BERAU	78	3,0701	ST
79	KABUPATEN BALANGAN	79	3,0671	ST
80	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	80	3,0644	ST
81	KABUPATEN BONDOWOSO	81	3,0614	ST
82	KABUPATEN TANAH DATAR	82	3,0587	ST
83	KABUPATEN BANGKA BARAT	83	3,0567	ST
84	KABUPATEN LEBAK	84	3,0541	ST
85	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	85	3,0517	ST
86	KABUPATEN TEMANGGUNG	86	3,0512	ST
87	KABUPATEN JEMBER	87	3,0491	ST
88	KABUPATEN PASANGKAYU	88	3,0477	ST
89	KABUPATEN SAROLANGUN	89	3,0452	ST
90	KABUPATEN TANAH BUMBU	90	3,0442	ST
91	KABUPATEN JEPARA	91	3,0391	ST
92	KABUPATEN SIGI	92	3,0361	ST
93	KABUPATEN KLATEN	93	3,0353	ST
94	KABUPATEN BARITO KUALA	94	3,0307	ST
95	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	95	3,0269	ST
96	KABUPATEN BANTAENG	96	3,0257	ST
97	KABUPATEN TABALONG	97	3,0240	ST
98	KABUPATEN MAJENE	98	3,0198	ST
99	KABUPATEN PANGKEJENE DAN	99	3,0191	ST

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
	KEPULAUAN			
100	KABUPATEN DELI SERDANG	100	3,0189	ST
101	KABUPATEN TEGAL	101	3,0183	ST
102	KABUPATEN CIAMIS	102	3,0165	ST
103	KABUPATEN LUWU TIMUR	103	3,0133	ST
104	KABUPATEN BANJAR	104	3,0100	ST
105	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	105	3,0064	ST
106	KABUPATEN PESISIR SELATAN	106	3,0059	ST
107	KABUPATEN SAMOSIR	107	3,0033	ST
108	KABUPATEN SOLOK	108	2,9953	T
109	KABUPATEN NATUNA	109	2,9945	T
110	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	110	2,9944	T
111	KABUPATEN MERANGIN	111	2,9938	T
112	KABUPATEN LAMANDAU	112	2,9934	T
113	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	113	2,9927	T
114	KABUPATEN AGAM	114	2,9913	T
115	KABUPATEN MUARA ENIM	115	2,9910	T
116	KABUPATEN MINAHASA UTARA	116	2,9901	T
117	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	117	2,9889	T
118	KABUPATEN SITUBONDO	118	2,9864	T
119	KABUPATEN TABANAN	119	2,9855	T
120	KABUPATEN WAYKANAN	120	2,9852	T
121	KABUPATEN LUWU UTARA	121	2,9834	T
122	KABUPATEN CILACAP	122	2,9807	T
123	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	123	2,9801	T
124	KABUPATEN SINTANG	124	2,9770	T
125	KABUPATEN TORAJA UTARA	125	2,9765	T
126	KABUPATEN BELITUNG	126	2,9745	T
127	KABUPATEN GORONTALO UTARA	127	2,9713	T
128	KABUPATEN BANGKA SELATAN	128	2,9701	T
129	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	129	2,9700	T
130	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	130	2,9652	T
131	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	131	2,9647	T
132	KABUPATEN LINGGA	132	2,9630	T
133	KABUPATEN BANGGAI	133	2,9596	T
134	KABUPATEN BENGKALIS	134	2,9582	T
135	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	135	2,9576	T
136	KABUPATEN KAMPAR	136	2,9564	T
137	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	137	2,9559	T
138	KABUPATEN WAJO	138	2,9545	T
139	KABUPATEN BUTON UTARA	139	2,9537	T
140	KABUPATEN BANDUNG	140	2,9536	T
141	KABUPATEN KAUR	141	2,9524	T
142	KABUPATEN SOLOK SELATAN	142	2,9455	T
143	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	143	2,9451	T
144	KABUPATEN WONOGIRI	144	2,9428	T
145	KABUPATEN BANJARNEGARA	145	2,9424	T
146	KABUPATEN MUSI RAWAS	146	2,9410	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
147	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	147	2,9384	T
148	KABUPATEN BATANG	148	2,9373	T
149	KABUPATEN BUNGO	149	2,9345	T
150	KABUPATEN TOLITOLI	150	2,9337	T
151	KABUPATEN KERINCI	151	2,9308	T
152	KABUPATEN BOALEMO	152	2,9300	T
153	KABUPATEN KOLAKA	153	2,9266	T
154	KABUPATEN BONE BOLANGO	154	2,9248	T
155	KABUPATEN SIJUNJUNG	155	2,9238	T
156	KABUPATEN PANDEGLANG	156	2,9202	T
157	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	157	2,9197	T
158	KABUPATEN BREBES	158	2,9195	T
159	KABUPATEN BANGKALAN	159	2,9176	T
160	KABUPATEN ASAHAN	160	2,9141	T
161	KABUPATEN WAKATOBI	161	2,9134	T
162	KABUPATEN PEMALANG	162	2,9110	T
163	KABUPATEN PULANG PISAU	163	2,9072	T
164	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	164	2,9062	T
165	KABUPATEN TANAH LAUT	165	2,9057	T
166	KABUPATEN KETAPANG	166	2,9044	T
167	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	167	2,9038	T
168	KABUPATEN BOMBANA	168	2,9037	T
169	KABUPATEN MAROS	169	2,9034	T
170	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	170	2,9019	T
171	KABUPATEN SAMPANG	171	2,9010	T
172	KABUPATEN LOMBOK UTARA	172	2,8970	T
173	KABUPATEN KARANGASEM	173	2,8956	T
174	KABUPATEN PRINGSEWU	174	2,8924	T
175	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	175	2,8911	T
176	KABUPATEN LAHAT	176	2,8902	T
177	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	177	2,8891	T
178	KABUPATEN TANGERANG	178	2,8858	T
179	KABUPATEN REMBANG	179	2,8848	T
180	KABUPATEN BANGLI	180	2,8830	T
181	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	181	2,8829	T
182	KABUPATEN KUBU RAYA	182	2,8812	T
183	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	183	2,8794	T
184	KABUPATEN OGAN ILIR	184	2,8794	T
185	KABUPATEN TEBO	185	2,8783	T
186	KABUPATEN PASAMAN BARAT	186	2,8758	T
187	KABUPATEN BIMA	187	2,8718	T
188	KABUPATEN ROKAN HULU	188	2,8708	T
189	KABUPATEN MAMASA	189	2,8702	T
190	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	190	2,8655	T
191	KABUPATEN BANYUASIN	191	2,8655	T
192	KABUPATEN MURUNG RAYA	192	2,8651	T
193	KABUPATEN MENTAWAI	193	2,8650	T
194	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	194	2,8641	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
195	KABUPATEN MUKOMUKO	195	2,8640	T
196	KABUPATEN TAPIN	196	2,8604	T
197	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	197	2,8567	T
198	KABUPATEN REJANG LEBONG	198	2,8567	T
199	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	199	2,8555	T
200	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	200	2,8552	T
201	KABUPATEN PELALAWAN	201	2,8552	T
202	KABUPATEN MINAHASA	202	2,8531	T
203	KABUPATEN LEBONG	203	2,8519	T
204	KABUPATEN LANDAK	204	2,8518	T
205	KABUPATEN POSO	205	2,8473	T
206	KABUPATEN BARITO UTARA	206	2,8472	T
207	KABUPATEN KOLAKA UTARA	207	2,8471	T
208	KABUPATEN DOMPU	208	2,8470	T
209	KABUPATEN KONAWE SELATAN	209	2,8469	T
210	KABUPATEN BULUNGAN	210	2,8447	T
211	KABUPATEN SEKADAU	211	2,8426	T
212	KABUPATEN KOTABARU	212	2,8419	T
213	KABUPATEN TANGGAMUS	213	2,8416	T
214	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	214	2,8402	T
215	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	215	2,8389	T
216	KABUPATEN MALUKU TENGAH	216	2,8363	T
217	KABUPATEN MAMUJU	217	2,8342	T
218	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	218	2,8278	T
219	KABUPATEN SAMBAS	219	2,8235	T
220	KABUPATEN KUTAI BARAT	220	2,8234	T
221	KABUPATEN ENREKANG	221	2,8208	T
222	KABUPATEN SERUYAN	222	2,8186	T
223	KABUPATEN SIKKA	223	2,8154	T
224	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	224	2,8150	T
225	KABUPATEN MALANG	225	2,8128	T
226	KABUPATEN TULUNGAGUNG	226	2,8109	T
227	KABUPATEN MALINAU	227	2,8077	T
228	KABUPATEN MESUJI	228	2,8076	T
229	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	229	2,8069	T
230	KABUPATEN EMPAT LAWANG	230	2,8034	T
231	KABUPATEN LABUANBATU UTARA	231	2,8031	T
232	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	232	2,7997	T
233	KABUPATEN KAPUAS HULU	233	2,7990	T
234	KABUPATEN LANGKAT	234	2,7980	T
235	KABUPATEN PESAWARAN	235	2,7933	T
236	KABUPATEN BUTON	236	2,7918	T
237	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	237	2,7907	T
238	KABUPATEN BARITO SELATAN	238	2,7857	T
239	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	239	2,7851	T
240	KABUPATEN PASER	240	2,7851	T
241	KABUPATEN TULANG BAWANG	241	2,7837	T
242	KABUPATEN MIMIKA	242	2,7833	T
243	KABUPATEN SANGGAU	243	2,7832	T
244	KABUPATEN ROTE NDAO	244	2,7809	T
245	KABUPATEN KEPULAUAN	245	2,7773	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
	SANGIHE			
246	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	246	2,7734	T
247	KABUPATEN BARITO TIMUR	247	2,7719	T
248	KABUPATEN LUWU	248	2,7711	T
249	KABUPATEN DAIRI	249	2,7697	T
250	KABUPATEN JAYAWIJAYA	250	2,7664	T
251	KABUPATEN SUMBA TIMUR	251	2,7638	T
252	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	252	2,7632	T
253	KABUPATEN TAPANULI UTARA	253	2,7627	T
254	KABUPATEN MANGGARAI	254	2,7618	T
255	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	255	2,7618	T
256	KABUPATEN SUKAMARA	256	2,7617	T
257	KABUPATEN KATINGAN	257	2,7585	T
258	KABUPATEN BANDUNG BARAT	258	2,7562	T
259	KABUPATEN MUARO JAMBI	259	2,7541	T
260	KABUPATEN ACEH SINGKIL	260	2,7509	T
261	KABUPATEN ACEH UTARA	261	2,7448	T
262	KABUPATEN DONGGALA	262	2,7445	T
263	KABUPATEN GAYO LUES	263	2,7431	T
264	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	264	2,7416	T
265	KABUPATEN ACEH SELATAN	265	2,7379	T
266	KABUPATEN BIREUEN	266	2,7340	T
267	KABUPATEN BENGKAYANG	267	2,7338	T
268	KABUPATEN ACEH TAMIANG	268	2,7314	T
269	KABUPATEN ACEH BESAR	269	2,7305	T
270	KABUPATEN TELUK BINTUNI	270	2,7280	T
271	KABUPATEN ACEH JAYA	271	2,7277	T
272	KABUPATEN TANA TIDUNG	272	2,7246	T
273	KABUPATEN SUMBA BARAT	273	2,7242	T
274	KABUPATEN ENDE	274	2,7234	T
275	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	275	2,7222	T
276	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	276	2,7197	T
277	KABUPATEN KUPANG	277	2,7135	T
278	KABUPATEN KAYONG UTARA	278	2,7107	T
279	KABUPATEN MEMPAWAH	279	2,7092	T
280	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	280	2,7084	T
281	KABUPATEN NAGEKEO	281	2,7084	T
282	KABUPATEN LABUANBATU SELATAN	282	2,7074	T
283	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	283	2,7045	T
284	KABUPATEN JAYAPURA	284	2,7011	T
285	KABUPATEN KUTAI TIMUR	285	2,6975	T
286	KABUPATEN SUBANG	286	2,6967	T
287	KABUPATEN LEMBATA	287	2,6965	T
288	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	288	2,6944	T
289	KABUPATEN BENGKULU UTARA	289	2,6940	T
290	KABUPATEN ALOR	290	2,6910	T
291	KABUPATEN BIAK NUMFOR	291	2,6908	T
292	KABUPATEN MERAUKE	292	2,6881	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
293	KABUPATEN FLORES TIMUR	293	2,6869	T
294	KABUPATEN KEPAHANG	294	2,6864	T
295	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	295	2,6847	T
296	KABUPATEN TELUK WONDAMA	296	2,6812	T
297	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	297	2,6799	T
298	KABUPATEN PIDIE JAYA	298	2,6765	T
299	KABUPATEN ACEH TENGAH	299	2,6750	T
300	KABUPATEN MUNA	300	2,6738	T
301	KABUPATEN SABU RAIJUA	301	2,6722	T
302	KABUPATEN BURU	302	2,6714	T
303	KABUPATEN SIMALUNGUN	303	2,6704	T
304	KABUPATEN BELU	304	2,6658	T
305	KABUPATEN BEKASI	305	2,6632	T
306	KABUPATEN PIDIE	306	2,6590	T
307	KABUPATEN KAPUAS	307	2,6579	T
308	KABUPATEN FAKFAK	308	2,6566	T
309	KABUPATEN NUNUKAN	309	2,6560	T
310	KABUPATEN MELAWI	310	2,6552	T
311	KABUPATEN NAGAN RAYA	311	2,6520	T
312	KABUPATEN MOJOKERTO	312	2,6448	T
313	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	313	2,6408	T
314	KABUPATEN JENEPONTO	314	2,6403	T
315	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	315	2,6352	T
316	KABUPATEN CIREBON	316	2,6287	T
317	KABUPATEN PURBALINGGA	317	2,6286	T
318	KABUPATEN KONAWE UTARA	318	2,6282	T
319	KABUPATEN PULAU MOROTAI	319	2,6271	T
320	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	320	2,6259	T
321	KABUPATEN PAMEKASAN	321	2,6154	T
322	KABUPATEN KARO	322	2,6130	T
323	KABUPATEN ROKAN HILIR	323	2,6121	T
324	KABUPATEN KAIMANA	324	2,6035	T
325	KABUPATEN RAJA AMPAT	325	2,6035	T
326	KABUPATEN BURU SELATAN	326	2,6014	T
327	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	327	2,5999	T
328	KABUPATEN BUOL	328	2,5951	T
329	KABUPATEN GUNUNG MAS	329	2,5877	T
330	KABUPATEN JOMBANG	330	2,5823	T
331	KABUPATEN CIANJUR	331	2,5821	T
332	KABUPATEN ACEH TIMUR	332	2,5781	T
333	KABUPATEN ASMAT	333	2,5689	T
334	KABUPATEN SELUMA	334	2,5627	T
335	KABUPATEN NIAS	335	2,5595	T
336	KABUPATEN SORONG SELATAN	336	2,5463	T
337	KABUPATEN NABIRE	337	2,5351	T
338	KABUPATEN SIMEULUE	338	2,5347	T
339	KABUPATEN BATANG HARI	339	2,5332	T
340	KABUPATEN KEBUMEN	340	2,5236	T
341	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	341	2,5183	T
342	KABUPATEN NIAS BARAT	342	2,5170	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
343	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	343	2,5102	T
344	KABUPATEN ACEH BARAT	344	2,5087	T
345	KABUPATEN SUMBA TENGAH	345	2,5049	T
346	KABUPATEN MOROWALI	346	2,5045	T
347	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	347	2,5026	T
348	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	348	2,4924	T
349	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	349	2,4717	T
350	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	350	2,4672	T
351	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	351	2,4627	T
352	KABUPATEN PADANG LAWAS	352	2,4580	T
353	KABUPATEN SUPIORI	353	2,4011	T
354	KABUPATEN NIAS SELATAN	354	2,3911	T
355	KABUPATEN ACEH TENGGARA	355	2,3559	T
356	KABUPATEN MANDAILING NATAL	356	2,3537	T
357	KABUPATEN KEEROM	357	2,3045	T
358	KABUPATEN PUNCAK	358	2,3001	T
359	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	359	2,2778	T
360	KABUPATEN YALIMO	360	2,2450	T
361	KABUPATEN DEIYAI	361	2,2103	T
362	KABUPATEN TOLIKARA	362	2,1763	T
363	KABUPATEN SORONG	363	2,1755	T
364	KABUPATEN INTAN JAYA	364	2,1243	T
365	KABUPATEN WAROPEN	365	2,0337	T
366	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	366	2,0137	T
367	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	367	1,9920	S
368	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	368	1,9575	S
369	KABUPATEN DOGIYAI	369	1,9434	S
370	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	370	1,9348	S
371	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	371	1,9012	S
372	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	372	1,8967	S
373	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	373	1,8899	S
374	KABUPATEN NIAS UTARA	374	1,8720	S
375	KABUPATEN TAMBRAUW	375	1,8719	S
376	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	376	1,8322	S
377	KABUPATEN NDUGA	377	1,8192	S
378	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	378	1,7579	S
379	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	379	1,7496	S
380	KABUPATEN BENER MERIAH	380	1,7492	S
381	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	381	1,7383	S
382	KABUPATEN MANOKWARI	382	1,7103	S
383	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	383	1,7023	S
384	KABUPATEN MAPPI	384	1,6921	S
385	KABUPATEN MAYBRAT	385	1,6565	S
386	KABUPATEN SARMI	386	1,6439	S
387	KABUPATEN TAKALAR	387	1,6428	S

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
388	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	388	1,5849	S
389	KABUPATEN NGADA	389	1,5821	S
390	KABUPATEN LABUHANBATU	390	1,5696	S
391	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	391	1,4930	S
392	KABUPATEN LANNY JAYA	392	1,4904	S
393	KABUPATEN PUNCAK JAYA	393	1,4571	S
394	KABUPATEN PANIAI	394	1,4178	S
395	KABUPATEN BATUBARA	395	1,3851	S
396	KABUPATEN YAHUKIMO	396	1,2966	S

C. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 93 (SEMBILAN PULUH TIGA) DAERAH KOTA SECARA NASIONAL.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KOTA MAKASSAR	1	3,4404	ST
2	KOTA GORONTALO	2	3,4142	ST
3	KOTA SEMARANG	3	3,3775	ST
4	KOTA PEKANBARU	4	3,3489	ST
5	KOTA TANGERANG	5	3,3314	ST
6	KOTA CIMAHI	6	3,3274	ST
7	KOTA MADIUN	7	3,3056	ST
8	KOTA BANJAR	8	3,3032	ST
9	KOTA SURABAYA	9	3,3029	ST
10	KOTA DENPASAR	10	3,3021	ST
11	KOTA BANDUNG	11	3,3019	ST
12	KOTA DEPOK	12	3,2858	ST
13	KOTA KEDIRI	13	3,2769	ST
14	KOTA BONTANG	14	3,2742	ST
15	KOTA SUKABUMI	15	3,2637	ST
16	KOTA TASIKMALAYA	16	3,2622	ST
17	KOTA BEKASI	17	3,2546	ST
18	KOTA SAMARINDA	18	3,2297	ST
19	KOTA MAGELANG	19	3,2214	ST
20	KOTA PAREPARE	20	3,2175	ST
21	KOTA METRO	21	3,2023	ST
22	KOTA PROBOLINGGO	22	3,2015	ST
23	KOTA YOGYAKARTA	23	3,1773	ST
24	KOTA PONTIANAK	24	3,1761	ST
25	KOTA BOGOR	25	3,1727	ST
26	KOTA PADANG	26	3,1723	ST
27	KOTA BUKITTINGGI	27	3,1668	ST
28	KOTA BIMA	28	3,1652	ST
29	KOTA TANGERANG SELATAN	29	3,1352	ST
30	KOTA PAYAKUMBUH	30	3,1338	ST
31	KOTA SALATIGA	31	3,1231	ST
32	KOTA CIREBON	32	3,1177	ST
33	KOTA BAUBAU	33	3,1113	ST
34	KOTA SURAKARTA	34	3,0992	ST
35	KOTA PEKALONGAN	35	3,0939	ST
36	KOTA BALIKPAPAN	36	3,0890	ST
37	KOTA BATAM	37	3,0857	ST

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
38	KOTA BANJARMASIN	38	3,0708	ST
39	KOTA BANJARBARU	39	3,0546	ST
40	KOTA PANGKALPINANG	40	3,0546	ST
41	KOTA PALOPO	41	3,0493	ST
42	KOTA PALEMBANG	42	3,0427	ST
43	KOTA BITUNG	43	3,0384	ST
44	KOTA KUPANG	44	3,0363	ST
45	KOTA SERANG	45	3,0233	ST
46	KOTA TANJUNGPINANG	46	3,0175	ST
47	KOTA SAWAHLUNTO	47	3,0139	ST
48	KOTA TIDORE KEPULAUAN	48	3,0123	ST
49	KOTA TEBING TINGGI	49	3,0020	ST
50	KOTA TOMOHON	50	3,0007	ST
51	KOTA PADANG PANJANG	51	2,9968	T
52	KOTA MANADO	52	2,9939	T
53	KOTA JAMBI	53	2,9893	T
54	KOTA KOTAMOBAGU	54	2,9865	T
55	KOTA SOLOK	55	2,9809	T
56	KOTA BANDA ACEH	56	2,9673	T
57	KOTA PRABUMULIH	57	2,9633	T
58	KOTA MATARAM	58	2,9623	T
59	KOTA JAYAPURA	59	2,9601	T
60	KOTA PALANGKA RAYA	60	2,9338	T
61	KOTA PALU	61	2,9253	T
62	KOTA BINJAI	62	2,8949	T
63	KOTA PARIAMAN	63	2,8900	T
64	KOTA BANDAR LAMPUNG	64	2,8870	T
65	KOTA DUMAI	65	2,8702	T
66	KOTA PAGARALAM	66	2,8660	T
67	KOTA SINGKAWANG	67	2,8556	T
68	KOTA TARAKAN	68	2,8461	T
69	KOTA SUNGAI PENUH	69	2,8413	T
70	KOTA TANJUNGBALAI	70	2,8348	T
71	KOTA SABANG	71	2,8128	T
72	KOTA AMBON	72	2,8023	T
73	KOTA TERNATE	73	2,8011	T
74	KOTA BLITAR	74	2,8003	T
75	KOTA MALANG	75	2,7942	T
76	KOTA MEDAN	76	2,7890	T
77	KOTA LANGSA	77	2,7856	T
78	KOTA PEMATANG SIANTAR	78	2,7802	T
79	KOTA SIBOLGA	79	2,7640	T
80	KOTA LUBUKLINGGAU	80	2,7623	T
81	KOTA SORONG	81	2,7501	T
82	KOTA BATU	82	2,7325	T
83	KOTA LHOKSEUMAWE	83	2,7246	T
84	KOTA TUAL	84	2,7043	T
85	KOTA GUNUNGSITOLI	85	2,6833	T
86	KOTA SUBULUSSALAM	86	2,6809	T
87	KOTA PADANGSIDIMPUAN	87	2,6721	T
88	KOTA MOJOKERTO	88	2,6615	T
89	KOTA CILEGON	89	2,6284	T
90	KOTA PASURUAN	90	2,6260	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
91	KOTA TEGAL	91	2,6052	T
92	KOTA BENGKULU	92	2,0480	T
93	KOTA KENDARI	93	1,8027	S



MENTERI DALAM NEGERI,

TUAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 118 - 8840 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
SECARA NASIONAL TAHUN 2017

- A. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI YANG BERPRESTASI PALING TINGGI SECARA NASIONAL.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	PROVINSI JAWA TIMUR	1	3,3021	ST
2	PROVINSI JAWA BARAT	2	3,2842	ST
3	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3	3,2048	ST

- B. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN YANG BERPRESTASI PALING TINGGI SECARA NASIONAL.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KABUPATEN SIDOARJO	1	3,4108	ST
2	KABUPATEN PASURUAN	2	3,3978	ST
3	KABUPATEN KARANGANYAR	3	3,3886	ST
4	KABUPATEN BANYUWANGI	4	3,3873	ST
5	KABUPATEN KUNINGAN	5	3,3807	ST
6	KABUPATEN BONE	6	3,3445	ST
7	KABUPATEN BINTAN	7	3,3338	ST
8	KABUPATEN BULUKUMBA	8	3,3291	ST
9	KABUPATEN GIANJAR	9	3,3212	ST
10	KABUPATEN POHUWATO	10	3,3175	ST

- C. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YANG BERPRESTASI PALING TINGGI SECARA NASIONAL.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KOTA MAKASSAR	1	3,4404	ST
2	KOTA GORONTALO	2	3,4142	ST
3	KOTA SEMARANG	3	3,3775	ST
4	KOTA PEKANBARU	4	3,3489	ST
5	KOTA TANGERANG	5	3,3314	ST
6	KOTA CIMAHI	6	3,3274	ST
7	KOTA MADIUN	7	3,3056	ST
8	KOTA BANJAR	8	3,3032	ST
9	KOTA SURABAYA	9	3,3029	ST
10	KOTA DENPASAR	10	3,3021	ST



MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 118 – 8840 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
SECARA NASIONAL TAHUN 2017

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA SANGAT TINGGI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DENGAN  
ATRIBUT BINTANG

A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN ATRIBUT BINTANG.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	SKOR	STATUS	BINTANG
1	PROVINSI JAWA TIMUR	3,3021	ST	***
2	PROVINSI JAWA BARAT	3,2842	ST	***
3	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3,2048	ST	**
4	PROVINSI DKI JAKARTA	3,1712	ST	**
5	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3,1593	ST	*
6	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3,1020	ST	*
7	PROVINSI JAWA TENGAH	3,0981	ST	*

B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN ATRIBUT BINTANG.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	SKOR	STATUS	BINTANG
1	KABUPATEN SIDOARJO	3,4108	ST	***
2	KABUPATEN PASURUAN	3,3978	ST	***
3	KABUPATEN KARANGANYAR	3,3886	ST	***
4	KABUPATEN BANYUWANGI	3,3873	ST	***
5	KABUPATEN KUNINGAN	3,3807	ST	***
6	KABUPATEN BONE	3,3445	ST	**
7	KABUPATEN BINTAN	3,3338	ST	**
8	KABUPATEN BULUKUMBA	3,3291	ST	**
9	KABUPATEN GIANJAR	3,3212	ST	**
10	KABUPATEN POHUWATO	3,3175	ST	**
11	KABUPATEN PATI	3,3144	ST	**
12	KABUPATEN GRESIK	3,3121	ST	**
13	KABUPATEN KARIMUN	3,2974	ST	**
14	KABUPATEN SRAGEN	3,2967	ST	**
15	KABUPATEN GORONTALO	3,2784	ST	**
16	KABUPATEN GARUT	3,2750	ST	**
17	KABUPATEN BANTUL	3,2641	ST	**
18	KABUPATEN SUKABUMI	3,2634	ST	**
19	KABUPATEN LAMONGAN	3,2631	ST	**
20	KABUPATEN BADUNG	3,2534	ST	**

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	SKOR	STATUS	BINTANG
21	KABUPATEN GOWA	3,2412	ST	**
22	KABUPATEN SEMARANG	3,2338	ST	**
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	3,2332	ST	**
24	KABUPATEN MADIUN	3,2240	ST	**
25	KABUPATEN PROBOLINGGO	3,2230	ST	**
26	KABUPATEN KLUNGKUNG	3,2143	ST	**
27	KABUPATEN BARRU	3,2113	ST	**
28	KABUPATEN PURWAKARTA	3,2097	ST	**
29	KABUPATEN SINJAI	3,2070	ST	**
30	KABUPATEN KEDIRI	3,2027	ST	**
31	KABUPATEN DEMAK	3,1989	ST	**
32	KABUPATEN SUMBAWA	3,1974	ST	**
33	KABUPATEN KUDUS	3,1959	ST	**
34	KABUPATEN KULON PROGO	3,1926	ST	**
35	KABUPATEN MAGETAN	3,1908	ST	**
36	KABUPATEN SLEMAN	3,1863	ST	*
37	KABUPATEN DHARMASRAYA	3,1856	ST	*
38	KABUPATEN PINRANG	3,1852	ST	*
39	KABUPATEN PACITAN	3,1840	ST	*
40	KABUPATEN PONOROGO	3,1672	ST	*
41	KABUPATEN INDRAMAYU	3,1636	ST	*
42	KABUPATEN KARAWANG	3,1596	ST	*
43	KABUPATEN TUBAN	3,1559	ST	*
44	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	3,1544	ST	*
45	KABUPATEN MAJALENGKA	3,1537	ST	*
46	KABUPATEN SIAK	3,1481	ST	*
47	KABUPATEN BOYOLALI	3,1428	ST	*
48	KABUPATEN SUMENEP	3,1416	ST	*
49	KABUPATEN LOMBOK BARAT	3,1345	ST	*
50	KABUPATEN SUKOHARJO	3,1332	ST	*
51	KABUPATEN PEKALONGAN	3,1311	ST	*
52	KABUPATEN SUMEDANG	3,1292	ST	*
53	KABUPATEN SOPPENG	3,1264	ST	*
54	KABUPATEN BOJONEGORO	3,1241	ST	*
55	KABUPATEN BLITAR	3,1238	ST	*
56	KABUPATEN NGANJUK	3,1215	ST	*
57	KABUPATEN BANYUMAS	3,1193	ST	*
58	KABUPATEN BOGOR	3,1174	ST	*
59	KABUPATEN JEMBRANA	3,1147	ST	*
60	KABUPATEN BANGKA	3,1147	ST	*

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	SKOR	STATUS	BINTANG
61	KABUPATEN MAGELANG	3,1128	ST	*
62	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	3,1095	ST	*
63	KABUPATEN GROBOGAN	3,1075	ST	*
64	KABUPATEN NGAWI	3,1011	ST	*
65	KABUPATEN TRENGGALEK	3,0997	ST	*
66	KABUPATEN PURWOREJO	3,0972	ST	*
67	KABUPATEN SERANG	3,0948	ST	*
68	KABUPATEN BANGKA TENGAH	3,0939	ST	*
69	KABUPATEN KENDAL	3,0932	ST	*
70	KABUPATEN WONOSOBO	3,0905	ST	*
71	KABUPATEN TANA TORAJA	3,0830	ST	*
72	KABUPATEN PASAMAN	3,0822	ST	*
73	KABUPATEN BLORA	3,0821	ST	*
74	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	3,0820	ST	*
75	KABUPATEN BULELENG	3,0808	ST	*
76	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	3,0758	ST	*
77	KABUPATEN LUMAJANG	3,0749	ST	*
78	KABUPATEN BERAU	3,0701	ST	*
79	KABUPATEN BALANGAN	3,0671	ST	*
80	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	3,0644	ST	*
81	KABUPATEN BONDOWOSO	3,0614	ST	*
82	KABUPATEN TANAH DATAR	3,0587	ST	*
83	KABUPATEN BANGKA BARAT	3,0567	ST	*
84	KABUPATEN LEBAK	3,0541	ST	*
85	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	3,0517	ST	*
86	KABUPATEN TEMANGGUNG	3,0512	ST	*
87	KABUPATEN JEMBER	3,0491	ST	*
88	KABUPATEN PASANGKAYU	3,0477	ST	*
89	KABUPATEN SAROLANGUN	3,0452	ST	*
90	KABUPATEN TANAH BUMBU	3,0442	ST	*
91	KABUPATEN JEPARA	3,0391	ST	*
92	KABUPATEN SIGI	3,0361	ST	*
93	KABUPATEN KLATEN	3,0353	ST	*
94	KABUPATEN BARITO KUALA	3,0307	ST	*
95	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	3,0269	ST	*
96	KABUPATEN BANTAENG	3,0257	ST	*
97	KABUPATEN TABALONG	3,0240	ST	*
98	KABUPATEN MAJENE	3,0198	ST	*
99	KABUPATEN PANGKEJENE DAN KEPULAUAN	3,0191	ST	*

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	SKOR	STATUS	BINTANG
100	KABUPATEN DELI SERDANG	3,0189	ST	*
101	KABUPATEN TEGAL	3,0183	ST	*
102	KABUPATEN CIAMIS	3,0165	ST	*
103	KABUPATEN LUWU TIMUR	3,0133	ST	*
104	KABUPATEN BANJAR	3,0100	ST	*
105	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	3,0064	ST	*
106	KABUPATEN PESISIR SELATAN	3,0059	ST	*
107	KABUPATEN SAMOSIR	3,0033	ST	*

C. PEMERINTAH DAERAH KOTA DENGAN ATRIBUT BINTANG.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA	SKOR	STATUS	BINTANG
1	KOTA MAKASSAR	3,4404	ST	***
2	KOTA GORONTALO	3,4142	ST	***
3	KOTA SEMARANG	3,3775	ST	***
4	KOTA PEKANBARU	3,3489	ST	**
5	KOTA TANGERANG	3,3314	ST	**
6	KOTA CIMAHI	3,3274	ST	**
7	KOTA MADIUN	3,3056	ST	**
8	KOTA BANJAR	3,3032	ST	**
9	KOTA SURABAYA	3,3029	ST	**
10	KOTA DENPASAR	3,3021	ST	**
11	KOTA BANDUNG	3,3019	ST	**
12	KOTA DEPOK	3,2858	ST	**
13	KOTA KEDIRI	3,2769	ST	**
14	KOTA BONTANG	3,2742	ST	**
15	KOTA SUKABUMI	3,2637	ST	**
16	KOTA TASIKMALAYA	3,2622	ST	**
17	KOTA BEKASI	3,2546	ST	**
18	KOTA SAMARINDA	3,2297	ST	**
19	KOTA MAGELANG	3,2214	ST	**
20	KOTA PAREPARE	3,2175	ST	**
21	KOTA METRO	3,2023	ST	**
22	KOTA PROBOLINGGO	3,2015	ST	**
23	KOTA YOGYAKARTA	3,1773	ST	*
24	KOTA PONTIANAK	3,1761	ST	*
25	KOTA BOGOR	3,1727	ST	*
26	KOTA PADANG	3,1723	ST	*
27	KOTA BUKITTINGGI	3,1668	ST	*
28	KOTA BIMA	3,1652	ST	*
29	KOTA TANGERANG SELATAN	3,1352	ST	*

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA	SKOR	STATUS	BINTANG
30	KOTA PAYAKUMBUH	3,1338	ST	*
31	KOTA SALATIGA	3,1231	ST	*
32	KOTA CIREBON	3,1177	ST	*
33	KOTA BAUBAU	3,1113	ST	*
34	KOTA SURAKARTA	3,0992	ST	*
35	KOTA PEKALONGAN	3,0939	ST	*
36	KOTA BALIKPAPAN	3,0890	ST	*
37	KOTA BATAM	3,0857	ST	*
38	KOTA BANJARMASIN	3,0708	ST	*
39	KOTA BANJARBARU	3,0546	ST	*
40	KOTA PANGKALPINANG	3,0546	ST	*
41	KOTA PALOPO	3,0493	ST	*
42	KOTA PALEMBANG	3,0427	ST	*
43	KOTA BITUNG	3,0384	ST	*
44	KOTA KUPANG	3,0363	ST	*
45	KOTA SERANG	3,0233	ST	*
46	KOTA TANJUNGPINANG	3,0175	ST	*
47	KOTA SAWAHLUNTO	3,0139	ST	*
48	KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,0123	ST	*
49	KOTA TEBING TINGGI	3,0020	ST	*
50	KOTA TOMOHON	3,0007	ST	*



MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 118 – 8840 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
SECARA NASIONAL TAHUN 2017

A. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DENGAN METODE PEMETAAN REGIONAL WILAYAH

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI WILAYAH BARAT.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	PROVINSI JAWA BARAT	1	3,3524	ST
2	PROVINSI JAWA TIMUR	2	3,3504	ST
3	PROVINSI DKI JAKARTA	3	3,2508	ST
4	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	4	3,2089	ST
5	PROVINSI JAWA TENGAH	5	3,1632	ST
6	PROVINSI DI YOGYAKARTA	6	3,0576	ST
7	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	2,9828	T
8	PROVINSI SUMATERA SELATAN	8	2,9552	T
9	PROVINSI RIAU	9	2,9233	T
10	PROVINSI SUMATERA BARAT	10	2,9075	T
11	PROVINSI BENGKULU	11	2,8925	T
12	PROVINSI BANTEN	12	2,8864	T
13	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	13	2,8749	T
14	PROVINSI SUMATERA UTARA	14	2,8632	T
15	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	15	2,8474	T
16	PROVINSI LAMPUNG	16	2,8404	T
17	PROVINSI ACEH	17	1,8393	S
18	PROVINSI JAMBI	18	1,7466	S

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 11 (SEBELAS) PROVINSI WILAYAH TENGAH.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1	3,2838	ST
2	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2	3,2122	ST
3	PROVINSI SULAWESI SELATAN	3	3,1061	ST
4	PROVINSI BALI	4	3,1026	ST
5	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	5	3,1004	ST
6	PROVINSI SULAWESI UTARA	6	3,0247	ST
7	PROVINSI SULAWESI BARAT	7	2,9468	T
8	PROVINSI GORONTALO	8	2,8975	T
9	PROVINSI SULAWESI TENGAH	9	2,8682	T
10	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	10	2,7925	T
11	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	11	2,6696	T

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 4 (EMPAT) PROVINSI WILAYAH TIMUR.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	PROVINSI MALUKU	1	2,7865	T
2	PROVINSI PAPUA	2	2,6062	T
3	PROVINSI PAPUA BARAT	3	2,5928	T
4	PROVINSI MALUKU UTARA	4	2,5613	T

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2 (DUA) DAERAH PROVINSI OTONOMI KHUSUS.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	PROVINSI PAPUA	1	2,6062	T
2	PROVINSI PAPUA BARAT	2	2,5928	T

B. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DENGAN METODE PEMETAAN REGIONAL WILAYAH

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 225 (DUA RATUS DUA PULUH LIMA) KABUPATEN WILAYAH BARAT.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KABUPATEN KARANGANYAR	1	3,4612	ST
2	KABUPATEN PASURUAN	2	3,4537	ST
3	KABUPATEN SIDOARJO	3	3,4456	ST
4	KABUPATEN BANYUWANGI	4	3,4381	ST
5	KABUPATEN KUNINGAN	5	3,4353	ST
6	KABUPATEN GRESIK	6	3,4233	ST
7	KABUPATEN BINTAN	7	3,3874	ST
8	KABUPATEN PATI	8	3,3804	ST
9	KABUPATEN GARUT	9	3,3521	ST
10	KABUPATEN SRAGEN	10	3,3408	ST
11	KABUPATEN KARIMUN	11	3,3366	ST
12	KABUPATEN SUKABUMI	12	3,3255	ST
13	KABUPATEN BANTUL	13	3,3037	ST
14	KABUPATEN SEMARANG	14	3,2950	ST
15	KABUPATEN TASIKMALAYA	15	3,2946	ST
16	KABUPATEN LAMONGAN	16	3,2941	ST
17	KABUPATEN PROBOLINGGO	17	3,2925	ST
18	KABUPATEN MADIUN	18	3,2918	ST
19	KABUPATEN KULON PROGO	19	3,2821	ST
20	KABUPATEN PURWAKARTA	20	3,2700	ST
21	KABUPATEN PACITAN	21	3,2507	ST
22	KABUPATEN DHARMASRAYA	22	3,2502	ST
23	KABUPATEN KEDIRI	23	3,2469	ST
24	KABUPATEN MAGETAN	24	3,2456	ST
25	KABUPATEN SLEMAN	25	3,2442	ST
26	KABUPATEN DEMAK	26	3,2393	ST
27	KABUPATEN MAJALENGKA	27	3,2330	ST
28	KABUPATEN KUDUS	28	3,2319	ST
29	KABUPATEN KARAWANG	29	3,2299	ST

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
30	KABUPATEN INDRAMAYU	30	3,2154	ST
31	KABUPATEN SUMENEP	31	3,2089	ST
32	KABUPATEN PONOROGO	32	3,2031	ST
33	KABUPATEN TUBAN	33	3,1995	ST
34	KABUPATEN PEKALONGAN	34	3,1971	ST
35	KABUPATEN SIAK	35	3,1919	ST
36	KABUPATEN BANGKA	36	3,1905	ST
37	KABUPATEN BOYOLALI	37	3,1874	ST
38	KABUPATEN BLITAR	38	3,1855	ST
39	KABUPATEN SUMEDANG	39	3,1829	ST
40	KABUPATEN BOGOR	40	3,1802	ST
41	KABUPATEN MAGELANG	41	3,1796	ST
42	KABUPATEN GROBOGAN	42	3,1735	ST
43	KABUPATEN NGAWI	43	3,1731	ST
44	KABUPATEN TRENGGALEK	44	3,1713	ST
45	KABUPATEN SERANG	45	3,1691	ST
46	KABUPATEN SUKOHARJO	46	3,1669	ST
47	KABUPATEN BOJONEGORO	47	3,1663	ST
48	KABUPATEN NGANJUK	48	3,1604	ST
49	KABUPATEN BANYUMAS	49	3,1577	ST
50	KABUPATEN LUMAJANG	50	3,1549	ST
51	KABUPATEN KENDAL	51	3,1542	ST
52	KABUPATEN WONOSOBO	52	3,1489	ST
53	KABUPATEN BANGKA TENGAH	53	3,1482	ST
54	KABUPATEN BLORA	54	3,1437	ST
55	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	55	3,1374	ST
56	KABUPATEN LEBAK	56	3,1365	ST
57	KABUPATEN PURWOREJO	57	3,1350	ST
58	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	58	3,1325	ST
59	KABUPATEN PASAMAN	59	3,1267	ST
60	KABUPATEN JEMBER	60	3,1259	ST
61	KABUPATEN TANAH DATAR	61	3,1245	ST
62	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	62	3,1142	ST
63	KABUPATEN BANGKA BARAT	63	3,1100	ST
64	KABUPATEN BONDOWOSO	64	3,0989	ST
65	KABUPATEN SAROLANGUN	65	3,0954	ST
66	KABUPATEN TEMANGGUNG	66	3,0900	ST
67	KABUPATEN PESISIR SELATAN	67	3,0852	ST
68	KABUPATEN DELI SERDANG	68	3,0849	ST
69	KABUPATEN KLATEN	69	3,0828	ST
70	KABUPATEN JEPARA	70	3,0750	ST
71	KABUPATEN BELITUNG	71	3,0657	ST
72	KABUPATEN NATUNA	72	3,0608	ST
73	KABUPATEN CIAMIS	73	3,0590	ST
74	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	74	3,0571	ST
75	KABUPATEN LAMANDAU	75	3,0560	ST
76	KABUPATEN AGAM	76	3,0556	ST
77	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	77	3,0489	ST
78	KABUPATEN WAYKANAN	78	3,0489	ST
79	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	79	3,0475	ST
80	KABUPATEN SOLOK	80	3,0471	ST

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
81	KABUPATEN TEGAL	81	3,0447	ST
82	KABUPATEN CILACAP	82	3,0440	ST
83	KABUPATEN SITUBONDO	83	3,0423	ST
84	KABUPATEN MUARA ENIM	84	3,0410	ST
85	KABUPATEN SAMOSIR	85	3,0399	ST
86	KABUPATEN BANGKA SELATAN	86	3,0364	ST
87	KABUPATEN MERANGIN	87	3,0337	ST
88	KABUPATEN KAUR	88	3,0327	ST
89	KABUPATEN MUSI RAWAS	89	3,0170	ST
90	KABUPATEN BENGKALIS	90	3,0170	ST
91	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	91	3,0104	ST
92	KABUPATEN BANJARNEGARA	92	3,0093	ST
93	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93	3,0074	ST
94	KABUPATEN SOLOK SELATAN	94	3,0058	ST
95	KABUPATEN LINGGA	95	3,0055	ST
96	KABUPATEN KAMPAR	96	2,9987	T
97	KABUPATEN SINTANG	97	2,9959	T
98	KABUPATEN WONOGIRI	98	2,9941	T
99	KABUPATEN BUNGO	99	2,9902	T
100	KABUPATEN BANDUNG	100	2,9897	T
101	KABUPATEN PEMALANG	101	2,9837	T
102	KABUPATEN SIJUNJUNG	102	2,9833	T
103	KABUPATEN PULANG PISAU	103	2,9798	T
104	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	104	2,9794	T
105	KABUPATEN PANDEGLANG	105	2,9753	T
106	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	106	2,9734	T
107	KABUPATEN KETAPANG	107	2,9721	T
108	KABUPATEN BATANG	108	2,9705	T
109	KABUPATEN KERINCI	109	2,9703	T
110	KABUPATEN BREBES	110	2,9700	T
111	KABUPATEN ASAHAN	111	2,9661	T
112	KABUPATEN MURUNG RAYA	112	2,9634	T
113	KABUPATEN REMBANG	113	2,9616	T
114	KABUPATEN BANYUASIN	114	2,9582	T
115	KABUPATEN BANGKALAN	115	2,9580	T
116	KABUPATEN TANGERANG	116	2,9549	T
117	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	117	2,9548	T
118	KABUPATEN LAHAT	118	2,9524	T
119	KABUPATEN MUKOMUKO	119	2,9452	T
120	KABUPATEN PRINGSEWU	120	2,9439	T
121	KABUPATEN KUBU RAYA	121	2,9421	T
122	KABUPATEN SAMPANG	122	2,9390	T
123	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	123	2,9384	T
124	KABUPATEN OGAN ILIR	124	2,9378	T
125	KABUPATEN MENTAWAI	125	2,9287	T
126	KABUPATEN PASAMAN BARAT	126	2,9269	T
127	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	127	2,9252	T
128	KABUPATEN TEBO	128	2,9174	T
129	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	129	2,9174	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
130	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	130	2,9169	T
131	KABUPATEN BARITO UTARA	131	2,9117	T
132	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	132	2,9079	T
133	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	133	2,9077	T
134	KABUPATEN PELALAWAN	134	2,9063	T
135	KABUPATEN ROKAN HULU	135	2,9036	T
136	KABUPATEN LEBONG	136	2,9005	T
137	KABUPATEN LANDAK	137	2,8982	T
138	KABUPATEN SEKADAU	138	2,8875	T
139	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	139	2,8858	T
140	KABUPATEN SERUYAN	140	2,8849	T
141	KABUPATEN REJANG LEBONG	141	2,8840	T
142	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	142	2,8830	T
143	KABUPATEN TANGGAMUS	143	2,8724	T
144	KABUPATEN KATINGAN	144	2,8702	T
145	KABUPATEN TULUNGAGUNG	145	2,8683	T
146	KABUPATEN TULANG BAWANG	146	2,8640	T
147	KABUPATEN LANGKAT	147	2,8624	T
148	KABUPATEN SAMBAS	148	2,8622	T
149	KABUPATEN LABUANBATU UTARA	149	2,8550	T
150	KABUPATEN MALANG	150	2,8518	T
151	KABUPATEN GAYO LUES	151	2,8517	T
152	KABUPATEN BARITO SELATAN	152	2,8494	T
153	KABUPATEN KAPUAS HULU	153	2,8475	T
154	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	154	2,8464	T
155	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	155	2,8454	T
156	KABUPATEN EMPAT LAWANG	156	2,8450	T
157	KABUPATEN MESUJI	157	2,8429	T
158	KABUPATEN TANJUNG JABUR TIMUR	158	2,8410	T
159	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	159	2,8367	T
160	KABUPATEN SANGGAU	160	2,8361	T
161	KABUPATEN PESAWARAN	161	2,8222	T
162	KABUPATEN BANDUNG BARAT	162	2,8180	T
163	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	163	2,8162	T
164	KABUPATEN MUARO JAMBI	164	2,8120	T
165	KABUPATEN BARITO TIMUR	165	2,8110	T
166	KABUPATEN ACEH UTARA	166	2,8102	T
167	KABUPATEN SUKAMARA	167	2,8069	T
168	KABUPATEN DAIRI	168	2,8069	T
169	KABUPATEN TAPANULI UTARA	169	2,7956	T
170	KABUPATEN ACEH SINGKIL	170	2,7939	T
171	KABUPATEN BIREUEN	171	2,7913	T
172	KABUPATEN ACEH BESAR	172	2,7905	T
173	KABUPATEN ACEH JAYA	173	2,7864	T
174	KABUPATEN BENGKAYANG	174	2,7832	T
175	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	175	2,7732	T
176	KABUPATEN ACEH TAMIANG	176	2,7721	T
177	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	177	2,7685	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
178	KABUPATEN ACEH SELATAN	178	2,7643	T
179	KABUPATEN LABUANBATU SELATAN	179	2,7630	T
180	KABUPATEN SUBANG	180	2,7617	T
181	KABUPATEN KAYONG UTARA	181	2,7586	T
182	KABUPATEN BENGKULU UTARA	182	2,7554	T
183	KABUPATEN SIMALUNGUN	183	2,7468	T
184	KABUPATEN KEPAHIANG	184	2,7468	T
185	KABUPATEN MEMPAWAH	185	2,7445	T
186	KABUPATEN ACEH TENGAH	186	2,7434	T
187	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	187	2,7317	T
188	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	188	2,7314	T
189	KABUPATEN KAPUAS	189	2,7216	T
190	KABUPATEN TANJUNG JABUR BARAT	190	2,7176	T
191	KABUPATEN PURBALINGGA	191	2,7006	T
192	KABUPATEN PIDIE JAYA	192	2,6947	T
193	KABUPATEN BEKASI	193	2,6947	T
194	KABUPATEN MELAWI	194	2,6867	T
195	KABUPATEN PIDIE	195	2,6814	T
196	KABUPATEN NAGAN RAYA	196	2,6793	T
197	KABUPATEN MOJOKERTO	197	2,6772	T
198	KABUPATEN CIREBON	198	2,6696	T
199	KABUPATEN ROKAN HILIR	199	2,6680	T
200	KABUPATEN PAMEKASAN	200	2,6661	T
201	KABUPATEN KARO	201	2,6631	T
202	KABUPATEN GUNUNG MAS	202	2,6491	T
203	KABUPATEN JOMBANG	203	2,6487	T
204	KABUPATEN CIANJUR	204	2,6224	T
205	KABUPATEN ACEH TIMUR	205	2,6214	T
206	KABUPATEN NIAS	206	2,6117	T
207	KABUPATEN SIMEULUE	207	2,6018	T
208	KABUPATEN SELUMA	208	2,5991	T
209	KABUPATEN BATANG HARI	209	2,5883	T
210	KABUPATEN KEBUMEN	210	2,5833	T
211	KABUPATEN NIAS BARAT	211	2,5653	T
212	KABUPATEN ACEH BARAT	212	2,5417	T
213	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	213	2,5327	T
214	KABUPATEN PADANG LAWAS	214	2,4867	T
215	KABUPATEN NIAS SELATAN	215	2,4433	T
216	KABUPATEN ACEH TENGGARA	216	2,4132	T
217	KABUPATEN MANDAILING NATAL	217	2,4046	T
218	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	218	1,9973	S
219	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	219	1,9535	S
220	KABUPATEN NIAS UTARA	220	1,9117	S
221	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	221	1,8900	S
222	KABUPATEN BENER MERIAH	222	1,8053	S
223	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	223	1,7935	S
224	KABUPATEN LABUHANBATU	224	1,6191	S
225	KABUPATEN BATUBARA	225	1,4092	S

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 118  
(SERATUS DELAPAN BELAS) KABUPATEN WILAYAH TENGAH.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KABUPATEN GIANJAR	1	3,4468	ST
2	KABUPATEN BONE	2	3,4082	ST
3	KABUPATEN BULUKUMBA	3	3,4066	ST
4	KABUPATEN POHUWATO	4	3,4058	ST
5	KABUPATEN GORONTALO	5	3,4032	ST
6	KABUPATEN BADUNG	6	3,3459	ST
7	KABUPATEN GOWA	7	3,3457	ST
8	KABUPATEN BARRU	8	3,3441	ST
9	KABUPATEN KLUNGKUNG	9	3,3258	ST
10	KABUPATEN PINRANG	10	3,2828	ST
11	KABUPATEN SINJAI	11	3,2795	ST
12	KABUPATEN LOMBOK BARAT	12	3,2766	ST
13	KABUPATEN SUMBAWA	13	3,2692	ST
14	KABUPATEN SOPPENG	14	3,2612	ST
15	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	15	3,2395	ST
16	KABUPATEN JEMBRANA	16	3,2333	ST
17	KABUPATEN BULELENG	17	3,2096	ST
18	KABUPATEN TANAH BUMBU	18	3,2089	ST
19	KABUPATEN BALANGAN	19	3,1920	ST
20	KABUPATEN TANA TORAJA	20	3,1910	ST
21	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	21	3,1730	ST
22	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	22	3,1712	ST
23	KABUPATEN BERAU	23	3,1662	ST
24	KABUPATEN PASANGKAYU	24	3,1589	ST
25	KABUPATEN BARITO KUALA	25	3,1521	ST
26	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	26	3,1471	ST
27	KABUPATEN BANTAENG	27	3,1360	ST
28	KABUPATEN TABALONG	28	3,1346	ST
29	KABUPATEN BANJAR	29	3,1330	ST
30	KABUPATEN MINAHASA TENGGERA	30	3,1315	ST
31	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	31	3,1300	ST
32	KABUPATEN LUWU TIMUR	32	3,1207	ST
33	KABUPATEN MAJENE	33	3,1082	ST
34	KABUPATEN MINAHASA UTARA	34	3,1075	ST
35	KABUPATEN TABANAN	35	3,1052	ST
36	KABUPATEN PANGKEJENE DAN KEPULAUAN	36	3,1038	ST
37	KABUPATEN TORAJA UTARA	37	3,1032	ST
38	KABUPATEN LUWU UTARA	38	3,0998	ST
39	KABUPATEN BANGGAI	39	3,0931	ST
40	KABUPATEN SIGI	40	3,0899	ST
41	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	41	3,0867	ST
42	KABUPATEN WAJO	42	3,0816	ST
43	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	43	3,0659	ST
44	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	44	3,0652	ST
45	KABUPATEN GORONTALO UTARA	45	3,0609	ST

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
46	KABUPATEN KOLAKA	46	3,0588	ST
47	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	47	3,0583	ST
48	KABUPATEN BONE BOLANGO	48	3,0553	ST
49	KABUPATEN BUTON UTARA	49	3,0443	ST
50	KABUPATEN KARANGASEM	50	3,0361	ST
51	KABUPATEN TOLITOLI	51	3,0105	ST
52	KABUPATEN KUTAI BARAT	52	3,0094	ST
53	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	53	3,0072	ST
54	KABUPATEN TAPIN	54	3,0072	ST
55	KABUPATEN BOMBANA	55	3,0038	ST
56	KABUPATEN BANGLI	56	3,0011	ST
57	KABUPATEN BOALEMO	57	2,9967	T
58	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	58	2,9922	T
59	KABUPATEN TANAH LAUT	59	2,9913	T
60	KABUPATEN MAROS	60	2,9875	T
61	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	61	2,9870	T
62	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	62	2,9762	T
63	KABUPATEN MINAHASA	63	2,9708	T
64	KABUPATEN BULUNGAN	64	2,9681	T
65	KABUPATEN LOMBOK UTARA	65	2,9679	T
66	KABUPATEN BIMA	66	2,9633	T
67	KABUPATEN WAKATOBI	67	2,9628	T
68	KABUPATEN MAMUJU	68	2,9525	T
69	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	69	2,9514	T
70	KABUPATEN KOTABARU	70	2,9496	T
71	KABUPATEN KONAWE SELATAN	71	2,9463	T
72	KABUPATEN MAMASA	72	2,9448	T
73	KABUPATEN DOMPU	73	2,9426	T
74	KABUPATEN MALINAU	74	2,9361	T
75	KABUPATEN ENREKANG	75	2,9355	T
76	KABUPATEN KOLAKA UTARA	76	2,9347	T
77	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	77	2,9261	T
78	KABUPATEN PASER	78	2,9226	T
79	KABUPATEN POSO	79	2,9109	T
80	KABUPATEN BUTON	80	2,9075	T
81	KABUPATEN SIKKA	81	2,9075	T
82	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	82	2,8932	T
83	KABUPATEN DONGGALA	83	2,8741	T
84	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	84	2,8619	T
85	KABUPATEN LUWU	85	2,8571	T
86	KABUPATEN SUMBA TIMUR	86	2,8538	T
87	KABUPATEN MANGGARAI	87	2,8523	T
88	KABUPATEN ROTE NDAO	88	2,8455	T
89	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	89	2,8405	T
90	KABUPATEN ENDE	90	2,8314	T
91	KABUPATEN SUMBA BARAT	91	2,8227	T
92	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	92	2,8221	T
93	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	93	2,8207	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
94	KABUPATEN KUTAI TIMUR	94	2,8137	T
95	KABUPATEN FLORES TIMUR	95	2,8009	T
96	KABUPATEN SABU RAIJUA	96	2,7983	T
97	KABUPATEN KUPANG	97	2,7950	T
98	KABUPATEN LEMBATA	98	2,7942	T
99	KABUPATEN NAGEKEO	99	2,7923	T
100	KABUPATEN TANA TIDUNG	100	2,7921	T
101	KABUPATEN NUNUKAN	101	2,7859	T
102	KABUPATEN BELU	102	2,7759	T
103	KABUPATEN ALOR	103	2,7753	T
104	KABUPATEN JENEPONTO	104	2,7302	T
105	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	105	2,7256	T
106	KABUPATEN MUNA	106	2,7132	T
107	KABUPATEN KONawe UTARA	107	2,7131	T
108	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	108	2,6784	T
109	KABUPATEN BUOL	109	2,6662	T
110	KABUPATEN MOROWALI	110	2,6118	T
111	KABUPATEN SUMBA TENGAH	111	2,5815	T
112	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	112	2,5512	T
113	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	113	2,5045	T
114	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	114	1,8223	S
115	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	115	1,7857	S
116	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	116	1,7257	S
117	KABUPATEN TAKALAR	117	1,7075	S
118	KABUPATEN NGADA	118	1,6788	S

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 53 (LIMA PULUH TIGA) KABUPATEN WILAYAH TIMUR.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KABUPATEN MIMIKA	1	2,9810	T
2	KABUPATEN JAYAWIJAYA	2	2,9324	T
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI	3	2,8689	T
4	KABUPATEN JAYAPURA	4	2,8616	T
5	KABUPATEN FAKFAK	5	2,8560	T
6	KABUPATEN MERAUKE	6	2,8530	T
7	KABUPATEN TELUK WONDAMA	7	2,8509	T
8	KABUPATEN MALUKU TENGAH	8	2,8287	T
9	KABUPATEN BIAK NUMFOR	9	2,8163	T
10	KABUPATEN KAIMANA	10	2,8046	T
11	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	11	2,7844	T
12	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	12	2,7780	T
13	KABUPATEN ASMAT	13	2,7459	T
14	KABUPATEN SORONG SELATAN	14	2,7338	T
15	KABUPATEN RAJA AMPAT	15	2,7220	T
16	KABUPATEN NABIRE	16	2,6821	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
17	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	17	2,6795	T
18	KABUPATEN BURU	18	2,6765	T
19	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	19	2,6693	T
20	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	20	2,6275	T
21	KABUPATEN PULAU MOROTAI	21	2,6193	T
22	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	22	2,6145	T
23	KABUPATEN BURU SELATAN	23	2,5992	T
24	KABUPATEN SUPIORI	24	2,5530	T
25	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	25	2,4995	T
26	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	26	2,4847	T
27	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	27	2,4811	T
28	KABUPATEN KEEROM	28	2,4570	T
29	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	29	2,4429	T
30	KABUPATEN PUNCAK	30	2,4204	T
31	KABUPATEN YALIMO	31	2,3789	T
32	KABUPATEN TOLIKARA	32	2,3328	T
33	KABUPATEN SORONG	33	2,3159	T
34	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	34	2,2681	T
35	KABUPATEN DEIYAI	35	2,2654	T
36	KABUPATEN INTAN JAYA	36	2,2509	T
37	KABUPATEN WAROPEN	37	2,1765	T
38	KABUPATEN DOGIYAI	38	2,0517	T
39	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	39	2,0157	T
40	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	40	2,0133	T
41	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	41	1,9970	S
42	KABUPATEN TAMBRAUW	42	1,9620	S
43	KABUPATEN NDUGA	43	1,8794	S
44	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	44	1,8684	S
45	KABUPATEN MANOKWARI	45	1,8181	S
46	KABUPATEN MAYBRAT	46	1,7886	S
47	KABUPATEN MAPPI	47	1,7650	S
48	KABUPATEN SARMI	48	1,7187	S
49	KABUPATEN PUNCAK JAYA	49	1,5831	S
50	KABUPATEN LANNY JAYA	50	1,5637	S
51	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	51	1,5335	S
52	KABUPATEN PANIAI	52	1,5126	S
53	KABUPATEN YAHUKIMO	53	1,4316	S

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 38 (TIGA PULUH) DAERAH KABUPATEN OTONOMI KHUSUS.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KABUPATEN MIMIKA	1	2,9810	T
2	KABUPATEN JAYAWIJAYA	2	2,9324	T
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI	3	2,8689	T
4	KABUPATEN JAYAPURA	4	2,8616	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
5	KABUPATEN FAKFAK	5	2,8560	T
6	KABUPATEN MERAUKE	6	2,8530	T
7	KABUPATEN TELUK WONDAMA	7	2,8509	T
8	KABUPATEN BIAK NUMFOR	8	2,8163	T
9	KABUPATEN KAIMANA	9	2,8046	T
10	KABUPATEN ASMAT	10	2,7459	T
11	KABUPATEN SORONG SELATAN	11	2,7338	T
12	KABUPATEN RAJA AMPAT	12	2,7220	T
13	KABUPATEN NABIRE	13	2,6821	T
14	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	14	2,6795	T
15	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	15	2,6693	T
16	KABUPATEN SUPIORI	16	2,5530	T
17	KABUPATEN KEEROM	17	2,4570	T
18	KABUPATEN PUNCAK	18	2,4204	T
19	KABUPATEN YALIMO	19	2,3789	T
20	KABUPATEN TOLIKARA	20	2,3328	T
21	KABUPATEN SORONG	21	2,3159	T
22	KABUPATEN DEIYAI	22	2,2654	T
23	KABUPATEN INTAN JAYA	23	2,2509	T
24	KABUPATEN WAROPEN	24	2,1765	T
25	KABUPATEN DOGIYAI	25	2,0517	T
26	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	26	2,0157	T
27	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	27	1,9970	S
28	KABUPATEN TAMBRAUW	28	1,9620	S
29	KABUPATEN NDUGA	29	1,8794	S
30	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	30	1,8684	S
31	KABUPATEN MANOKWARI	31	1,8181	S
32	KABUPATEN MAYBRAT	32	1,7886	S
33	KABUPATEN MAPPI	33	1,7650	S
34	KABUPATEN SARMI	34	1,7187	S
35	KABUPATEN PUNCAK JAYA	35	1,5831	S
36	KABUPATEN LANNY JAYA	36	1,5637	S
37	KABUPATEN PANIAI	37	1,5126	S
38	KABUPATEN YAHUKIMO	38	1,4316	S

C. PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DENGAN METODE PEMETAAN REGIONAL WILAYAH

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 66 (ENAM PULUH ENAM) KOTA WILAYAH BARAT.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KOTA SEMARANG	1	3,3768	ST
2	KOTA PEKANBARU	2	3,3420	ST
3	KOTA TANGERANG	3	3,3371	ST
4	KOTA CIMAHI	4	3,3271	ST
5	KOTA SURABAYA	5	3,3042	ST
6	KOTA BANJAR	6	3,2987	ST
7	KOTA MADIUN	7	3,2980	ST
8	KOTA BANDUNG	8	3,2960	ST
9	KOTA DEPOK	9	3,2863	ST

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
10	KOTA SUKABUMI	10	3,2763	ST
11	KOTA KEDIRI	11	3,2762	ST
12	KOTA TASIKMALAYA	12	3,2615	ST
13	KOTA BEKASI	13	3,2544	ST
14	KOTA MAGELANG	14	3,2164	ST
15	KOTA METRO	15	3,2055	ST
16	KOTA PROBOLINGGO	16	3,2029	ST
17	KOTA YOGYAKARTA	17	3,1950	ST
18	KOTA PADANG	18	3,1944	ST
19	KOTA PONTIANAK	19	3,1769	ST
20	KOTA BOGOR	20	3,1722	ST
21	KOTA BUKITTINGGI	21	3,1675	ST
22	KOTA TANGERANG SELATAN	22	3,1452	ST
23	KOTA PAYAKUMBUH	23	3,1327	ST
24	KOTA CIREBON	24	3,1273	ST
25	KOTA SALATIGA	25	3,1225	ST
26	KOTA SURAKARTA	26	3,1152	ST
27	KOTA PEKALONGAN	27	3,0989	ST
28	KOTA BATAM	28	3,0837	ST
29	KOTA PANGKALPINANG	29	3,0574	ST
30	KOTA PALEMBANG	30	3,0488	ST
31	KOTA SERANG	31	3,0324	ST
32	KOTA TANJUNGPINANG	32	3,0277	ST
33	KOTA TEBING TINGGI	33	3,0154	ST
34	KOTA SAWAHLUNTO	34	2,9998	T
35	KOTA PADANG PANJANG	35	2,9975	T
36	KOTA JAMBI	36	2,9935	T
37	KOTA SOLOK	37	2,9727	T
38	KOTA BANDA ACEH	38	2,9659	T
39	KOTA PRABUMULIH	39	2,9642	T
40	KOTA PALANGKA RAYA	40	2,9366	T
41	KOTA BANDAR LAMPUNG	41	2,8975	T
42	KOTA BINJAI	42	2,8926	T
43	KOTA PARIAMAN	43	2,8919	T
44	KOTA DUMAI	44	2,8722	T
45	KOTA PAGARALAM	45	2,8673	T
46	KOTA SINGKAWANG	46	2,8589	T
47	KOTA SUNGAI PENUH	47	2,8524	T
48	KOTA TANJUNGBALAI	48	2,8343	T
49	KOTA SABANG	49	2,8072	T
50	KOTA MEDAN	50	2,7968	T
51	KOTA BLITAR	51	2,7961	T
52	KOTA MALANG	52	2,7939	T
53	KOTA LANGSA	53	2,7843	T
54	KOTA PEMATANG SIANTAR	54	2,7755	T
55	KOTA SIBOLGA	55	2,7655	T
56	KOTA LUBUKLINGGAU	56	2,7590	T
57	KOTA BATU	57	2,7318	T
58	KOTA LHOKSEUMAWE	58	2,7232	T
59	KOTA GUNUNGSITOLI	59	2,7011	T
60	KOTA SUBULUSSALAM	60	2,6808	T
61	KOTA PADANGSIDIMPUAN	61	2,6780	T
62	KOTA MOJOKERTO	62	2,6704	T

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
63	KOTA CILEGON	63	2,6268	T
64	KOTA PASURUAN	64	2,6225	T
65	KOTA TEGAL	65	2,6160	T
66	KOTA BENGKULU	66	2,0487	T

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 21  
(DUA PULUH SATU) KOTA WILAYAH TENGAH.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KOTA MAKASSAR	1	3,4431	ST
2	KOTA GORONTALO	2	3,4243	ST
3	KOTA DENPASAR	3	3,2951	ST
4	KOTA BONTANG	4	3,2756	ST
5	KOTA SAMARINDA	5	3,2278	ST
6	KOTA PAREPARE	6	3,2159	ST
7	KOTA BIMA	7	3,1666	ST
8	KOTA BAUBAU	8	3,1375	ST
9	KOTA BANJARMASIN	9	3,0954	ST
10	KOTA BALIKPAPAN	10	3,0915	ST
11	KOTA BANJARBARU	11	3,0725	ST
12	KOTA PALOPO	12	3,0603	ST
13	KOTA KUPANG	13	3,0470	ST
14	KOTA BITUNG	14	3,0441	ST
15	KOTA TOMOHON	15	3,0183	ST
16	KOTA KOTAMOBAGU	16	2,9969	T
17	KOTA MATARAM	17	2,9715	T
18	KOTA MANADO	18	2,9607	T
19	KOTA PALU	19	2,9157	T
20	KOTA TARAKAN	20	2,8697	T
21	KOTA KENDARI	21	1,8255	S

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 6  
(ENAM) KOTA WILAYAH TIMUR.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KOTA SORONG	1	3,1662	ST
2	KOTA TIDORE KEPULAUAN	2	3,1501	ST
3	KOTA AMBON	3	2,9849	T
4	KOTA JAYAPURA	4	2,9745	T
5	KOTA TERNATE	5	2,9197	T
6	KOTA TUAL	6	2,9043	T

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2  
(DUA) KOTA DI WILAYAH OTONOMI KHUSUS.

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		STATUS
		NOMOR	SKOR	
1	KOTA SORONG	1	3,1662	ST
2	KOTA JAYAPURA	2	2,9745	T

